



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RACHMAD BASARI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 718701

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.760.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.259.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY JB 74 JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
4. MOBIL, HONDA SUV COMPACT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MOTOR BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.338.757.930

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 9.297.757.930



III. HUTANG

Rp. 321.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.976.257.930

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.